

Implementasi Penyaluran Bantuan Pupuk Bersubsidi di Desa Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Mirnawati^{1*}, Wahyu Widodo², Sigit Setioko³, Tri Widodo⁴, Umi Salamah⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Indonesia

 mirnaheru5@gmail.com*

Abstract

One of the government policies in agriculture that requires effective implementation is subsidized fertilizer distribution programs which is regulated in the Minister of Trade Number: 15/M DAG/PER/4/2013 which explains the Provision and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector. However, this program was not run well. The purpose of this study is to determine communication, resources, and disposition in the implementation of subsidized fertilizer distribution in Sumber Katon Village, Seputih Surabaya District, Central Lampung Regency.

This research uses qualitative methods, while the research sources consist of primary data and secondary data, determining informants, namely purposive sampling techniques or deliberately choosing people who are considered to be able to provide accurate information. The data collecting techniques were observation, interview, and documentation.

The research results show that there has been good communication between the government, distributors, and the community distributing subsidized fertilizer based on the results of the Definitive Group Needs Plan. Communication is also established between Distributors, Retailers, and farmers. However, providing information is not optimal, and there was a limiting fertilizer quota. Good implementation of subsidized fertilizer distribution continues to be pursued despite many obstacles.

Keywords: Subsidized Fertilizer, Government Policy

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 29, 2024

Revised

April 22, 2024

Accepted

May 17, 2024

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Proses kebijakan merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang dipandang sebagai alat administrasi publik yang terdiri dari aktor dan organisasi, prosedur, teknik dan sumber data diatur untuk tampil secara bersamaan dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan. Implementasi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan dan juga dilaksanakan yang merupakan bagian dari proses administrasi yang mengacu pada desain atau pengimplementasian sistem administrasi yang memiliki konsekuensi dalam pelaksanaan, isi, dan dampak suatu kebijakan (Redhani & Satria, 2020). Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah struktur kebijakan secara keseluruhan. Tahap ini akan menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar diterapkan dan dilaksanakan di lapangan dan berhasil memberikan output dan outcome sesuai dengan

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v8i1.8925>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 8 Number 1, May 2024, page 84-95

yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan suatu output dan outcomes yang telah ditentukan, maka kebijakan publik harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, kebijakan itu hanya akan menjadi catatan elit (Djabier, 2015). Salah satu kebijakan pemerintah adalah di bidang pertanian yang membutuhkan pelaksanaan distribusi yang efektif dalam program pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M DAG/PER/4/2013 yang menjelaskan tentang Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi untuk Sektor Pertanian. Pupuk bersubsidi adalah program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, tentang pupuk bersubsidi yang merupakan jenis barang dalam pengawasan dan penyediaan serta penyalurannya mendapat bantuan pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Oleh karena itu, sebagai barang yang diawasi dan diatur, dalam beberapa peraturan, baik peraturan presiden maupun peraturan menteri, seperti Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah disusun.

Masalah pupuk di Indonesia selalu menjadi persoalan yang menyentuh langsung pada kebutuhan petani dalam mengelola lahan. Oleh karena itu, ketika pupuk mengalami kelangkaan dan harganya mahal maka petanilah yang akan menjadi korban utamanya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah, sedangkan pupuk nonsubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi. Kebijakan pemberian pupuk bersubsidi di tingkat petani diupayakan untuk memenuhi enam prinsip yang tepat, yaitu: tempat, jenis, waktu, jumlah, kualitas dan harga yang wajar sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan.

Pupuk memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan yang meliputi aspek teknis penyediaan, distribusi dan harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan penyaluran pupuk yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan kebutuhan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk cukup komprehensif. Namun berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk memadai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan. Lebih khusus lagi, masih sering terjadinya berbagai kasus permasalahan, termasuk kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi harga eceran tertinggi (HET), dan margin pemasaran lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah.

Masalah yang terjadi adalah keterlambatan dalam penyaluran pupuk subsidi, karena satu minggu saja terlambat maka berpengaruh besar terhadap tanaman. Permasalahan lainnya adalah tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk bersubsidi lebih tinggi dijual di kios-kios pupuk. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui komunikasi, sumber daya dan disposisi dalam implementasi

penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi warga di desa sumber katon mengenai implementasi penyaluran bantuan pupuk bersubsidi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun sumber penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, penentuan informan yaitu teknik purposive sampling atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat. Data penelitian dikumpul dengan cara teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dalam bidang ilmu administrasi yang berkaitan dengan implementasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sumber katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Distribusi pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah berjalan dengan kurang baik dan kurang maksimal hal ini dikarenakan masih terjadinya kelangkaan pupuk, disebabkan karena terjadi perbedaan antara RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang disusun oleh kelompok tani tidak sesuai dengan alokasi pupuk yang diberikan oleh pemerintah pusat, ini merupakan permasalahan yang muncul dan harus segera diselesaikan.

Maka dari itu implemmentasi yang baik sangat perlu dilakukan, sehingga peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Edward III, karena beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk melihat permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang berjalan dengan kurang baik dan kurang maksimal. Teori implementasi ini merujuk kepada faktor pendukung implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Ketiga aspek tersebut lah yang menjadi dasar implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, berikut dipaparkan secara rinci hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang ditentukan, berikut hasil penelitiannya.

Komunikasi

Dalam sebuah organisasi komunikasi sangat diperlukan untuk menyampaikan sebuah pesan atau arahan dalam menyelesaikan sesuatu kebijakan yang harus dilaksanakan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai semaksimal mungkin. Implementasi penyaluran bantuan pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, komunikasi yang dimaksudkan oleh peneliti terdiri dari komunikasi yang dilakukan antar sesama pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, komunikasi yang terjalin dengan baik antar pihak-pihak yang terlibat, dampak dari komunikasi terhadap proses implementasi kebijakan dan hambatan- hambatan yang terjadi pada saat komunikasi dengan informan . Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah swasta yaitu memberikan Rencana

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun oleh kelompok Tani, dalam hal penyaluran ini Distributor harus memperhatikan RDKK yang sudah disusun yang selanjutnya nanti diberikan ke pengecer dan tak lupa dengan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kerja sama dengan distributor dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan informasi dari pemerintah. Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh distributor ke pengecer juga perlu dilakukan dan sudah berjalan baik, tetapi perlu dilakukan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan implementasi penyaluran pupuk yang lebih maksimal. Dalam hal ini yang menjadi hambatan yaitu salah satunya ada pembatasan kuota pupuk yang disalurkan pupuk yang ada tidak sesuai dengan RDKK yang sudah disusun dan komunikasi yang dibangun oleh pengecer dan distributor perlu ditingkatkan karena pelaporan yang dilakukan oleh pengecer selalu terlambat akibatnya pengecer perlu menunggu sampai distributor menyediakan pupuk. Komunikasi terhambat salah satunya dikarenakan pendekatan pemerintah dengan masyarakat yang kurang dan penyesuaian diri antara pemerintah dan masyarakat, diperlukan penyelesaian masalah tersebut agar tidak menghambat komunikasi dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi. Komunikasi sangat diperlukan terhadap proses implementasi sehingga dapat memberikan kepuasan petani diakibatkan salah satunya kuota yang diinginkan petani tidak memadai atau kekurangan. Komunikasi sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan mulai dari penyusunan RDKK, penentuan kuota, pelaksanaan aturan dan penyaluran pupuk. Setiap distributor memiliki aturan dan tata cara yang berbeda-beda, maka distributor harus memperbaiki komunikasi berupa pemberian informasi secara intens agar komunikasi tersebut memberikan dampak yang baik terlebih untuk petani. Komunikasi sangat perlu dilakukan oleh pemerintah karena sangat berdampak dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan dari hasil Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun. Cara membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini berdasarkan atas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat karena isi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah jumlah kebutuhan petani secara riil terhadap pupuk bersubsidi selama satu tahun yang penyusunannya melalui musyawarah. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini disusun petani secara berkelompok. Nantinya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini akan memberikan panduan jumlah pupuk yang akan disalurkan, selain itu juga berisi rincian sumber daya, sasaran produktivitas, pengorganisasian, adanya pembagian kerja dan adanya kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani di Desa Sumber Katon.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Sedangkan komunikasi juga terjalin antara kelompok tani dengan Distributor yang telah dipercayai untuk menyalurkan pupuk, dalam hal penyaluran ini Distributor harus memperhatikan RDKK yang sudah ada yang selanjutnya nanti diberikan ke pengecer. Distributor dan pengecer merupakan kunci keberhasilan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi agar pupuk bisa sampai ke tangan petani yang berhak terhadap pupuk bersubsidi sesuai dengan tahapan atau mekanisme yang telah diatur. Setiap Distributor memiliki wilayahnya masing-masing dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Pengecer juga berperan dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi yang merupakan bagian dari Lini IV. Pengecer harus memperhatikan Harga Eceran Tertinggi atau disebut dengan HET. Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani dalam kemasan dari hasil penelitian yang dilakukan. Di sisi lain masyarakat merasakan bahwa komunikasi yang terjalin antar pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya optimal tentang pemberian informasi mengenai pupuk ya. Pupuk bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani yang pada dasarnya digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya bertani. Seharusnya komunikasi berupa pemahaman masyarakat dalam proses implementasi diperhatikan lebih detail lagi karena sangat berpengaruh terhadap optimalnya sebuah implementasi kebijakan.

Sumber Daya

Sumber daya (resources) dalam sebuah organisasi sangatlah penting dan dibutuhkan. Hal ini sejalan ketersediaan sumber daya pendukung dalam sebuah organisasi, terkhusus sumber daya manusia dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Selain itu sumber daya material sangat diperlukan dalam menunjang pengimplementasian sebuah kebijakan. Menurut peneliti Sumber daya yang dimaksud berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk, pihak pelaksana memiliki kemampuan yang baik dalam implementasi penyaluran, sumber daya manusia dan materil yang memadai. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi adalah Kelompok Tani dan beserta struktur anggotanya. Sehingga dapat dianalisis bahwa semua pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi yaitu struktur anggota kelompok tani, dan distributor atau penyalur yang ada di Desa Sumber Katon.

Pelaksanaan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi maka salah satu faktor yang mendukung yaitu tempat dan pihak pelaksana memiliki kemampuan yang baik sehingga mampu merealisasikan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kemampuan yang baik mendukung implementasi penyaluran pupuk bersubsidi karena pihak-pihak mampu dan mengetahui fungsi dan tugas pokok yang telah diberikan, penguatan kelembagaan dan instrumen hukum menjadi pendukung kesuksesan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon. Pihak- pihak yang terlibat harus berkompeten dan juga berkualitas untuk mendukung proses implementasi yang adil.

Sumber Daya terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi yaitu, distributor yang ada di Desa Sumber Katon, Pengecer Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Petani. Pihak Pelaksana memiliki kemampuan dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi, penguatan kelembagaan dan instrumen hukum menjadi pendukung kesuksesan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon. Sumber daya manusia dan materil yang memadai dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kemampuan yang baik mendukung implementasi penyaluran pupuk bersubsidi, pihak-pihak yang dilibatkan ditentukan sesuai dengan syarat-syarat yang dikeluarkan. Kemampuan dan tempat serta sarana prasarana yang baik mendukung implementasi penyaluran pupuk bersubsidi karena pihak-pihak mampu dan mengetahui fungsi dan tugas pokok yang telah diberikan, penguatan kelembagaan dan instrumen hukum menjadi pendukung kesuksesan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon. Setiap

distributor memiliki tata cara atau sistem yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan permintaan sehingga penyaluran pupuk berdasarkan permintaan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan kemampuan serta peningkatan sumber daya manusia dan materil dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi serta pelaksanaan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait karena pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan kunci peningkatan kinerja dalam implementasi dan efektivitas kebijakan. Implementasi dapat berhasil secara optimal harus memperhitungkan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan yang telah dibuat, sumber daya yang berintegritas dan berkompeten sangat diperlukan. Selain itu sumber anggaran atau materil yang mencukupi juga berperan penting dalam menunjang implementasi.

Disposisi

Berkaitan dengan adanya kemauan, keinginan kuat para pelaku kebijakan dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sehingga, disposisi yang dimaksud oleh peneliti terdiri dari pihak-pihak terkait memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan kegiatan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi dan tujuan kebijakan harus dicapai tentang implementasi penyaluran pupuk bersubsidi. Pelayanan publik berupa implementasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani tidak mampu berjalan optimal jika tidak diikuti dengan keinginan yang kuat dari pihak-pihak yang terkait. Kelompok Tani Desa Sumber Katon memiliki keinginan yang kuat dalam penyaluran pupuk bersubsidi, keinginan ini diwujudkan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Keinginan yang kuat juga dirasakan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani bahwa keinginan yang kuat ini bisa dilihat dari peraturan yang dikeluarkan dan dapat di nilai bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang begitu ketat dalam pengambilan pupuk yang sudah terdaftar dalam Kelompok Tani dan RDKK. Pembatasan pupuk yang terjadi dan tidak sesuai dengan RDKK yang telah disusun dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, maka dari itu implementasi belum terlaksana secara optimal.

Pencapaian tujuan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi terus diusahakan meski terjadi banyak hambatan-hambatan, memang perlu untuk perbaikan-perbaikan guna mencapai pelaksanaan tujuan tersebut. Pembatasan pupuk yang terjadi perlu ditindak lanjuti karena RDKK yang telah disusun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, maka dari itu tujuan implementasi belum terlaksana secara optimal. Maka, diperlukan peningkatan-peningkatan koordinasi antara pihak terkait. Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon perlu memberikan dampak yang positif terhadap petani melalui RDKK yang harusnya mampu mencukupi kebutuhan petani akan pupuk, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Katon.

Kegiatan Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Sumber Katon memiliki keinginan yang kuat dalam menyukseskan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi. Keinginan ini diwujudkan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran. Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi merupakan bagian dari pelayanan publik, maka dari itu implementasi ini tidak bisa berdiri sendirinya tanpa disokong oleh keinginan yang kuat dari pihak-pihak yang terlibat untuk membawa peningkatan yang jauh lebih baik.

Keinginan yang kuat juga dirasakan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani bahwa keinginan yang kuat ini bisa dilihat dari peraturan yang dikeluarkan. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang begitu ketat dalam pengambilan pupuk yang hanya sudah terdaftar dalam Kelompok Tani dan RDKK. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari keinginan yang kuat dalam menyukseskan sebuah kebijakan yang telah disusun. Keinginan yang kuat tersebut dilaksanakan dalam bentuk peningkatan-peningkatan sumber daya manusia, materil maupun segi hukum dari implementasi kebijakan tersebut.

PEMBAHASAN

Komunikasi

Distribusi bantuan pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon, komunikasi penting dilakukan untuk menyampaikan sebuah pesan atau arahan dalam melaksanakan kebijakan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai semaksimal mungkin. Pupuk bersubsidi merupakan barang yang diawasi pengadaan dan penyalurannya yang telah mendapat subsidi dari pemerintah untuk keperluan petani di bidang pertanian. Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon, komunikasi terdiri dari komunikasi yang dilakukan antar sesama pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, tingkat komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat dan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat komunikasi, berikut akan dibahas satu persatu.

Komunikasi yang Dilakukan Terhadap Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi antara Pemerintah, Pihak Swasta dan Masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan dari hasil Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun. Cara membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini berdasarkan atas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat karena isi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah jumlah kebutuhan petani secara riil terhadap pupuk bersubsidi selama satu tahun yang penyusunannya melalui musyawarah. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini disusun petani secara berkelompok. Nantinya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini akan memberikan panduan jumlah pupuk yang akan disalurkan, selain itu juga berisi rincian sumber daya, sasaran produktivitas, pengorganisasian, adanya pembagian kerja dan adanya kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani di Desa Sumber Katon.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Sedangkan komunikasi juga terjalin antara kelompok tani dengan Distributor yang telah dipercayai untuk menyalurkan pupuk, dalam hal penyaluran ini Distributor harus memperhatikan RDKK yang sudah ada yang selanjutnya nanti diberikan ke pengecer. Distributor dan pengecer merupakan kunci keberhasilan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi agar pupuk bisa sampai ke tangan petani yang berhak terhadap pupuk bersubsidi sesuai dengan tahapan atau mekanisme yang telah diatur. Setiap Distributor memiliki wilayahnya masing-masing dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Pengecer juga berperan dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi yang merupakan bagian dari Lini IV. Pengecer harus memperhatikan Harga Eceran Tertinggi atau disebut dengan HET. Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani dalam kemasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Di sisi lain masyarakat merasakan bahwa komunikasi yang terjalin antar pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya optimal tentang pemberian informasi mengenai pupuk ya. Pupuk bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani yang pada dasarnya digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya bertani. Seharusnya komunikasi berupa pemahaman masyarakat dalam proses implementasi diperhatikan lebih detail lagi karena sangat berpengaruh terhadap optimalnya sebuah implementasi kebijakan.

Tingkat Komunikasi yang Terjalin antara Pihak-Pihak yang Terlibat

Hasil penelitian bahwa komunikasi juga dilaksanakan dengan baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi yaitu antara pemerintah, distributor, pengecer, Kelompok Tani maupun Petani. Pemberian informasi terus dilakukan oleh pihak Distributor Pupuk Bersubsidi pihak yang dipercayai terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi berupa pelaksanaan pelaporan secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab penyaluran. Sedangkan antara pihak distributor dengan pengecer juga telah diterapkan pemberian informasi yang sudah terjalin dengan baik antar pihak-pihak yang terlibat.

Komunikasi sangat perlu dilakukan, semakin intens sebuah komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang ikut serta dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi maka tingkat kesepahaman dan kesepakatan semakin tinggi pula sehingga perlu dilakukan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan implementasi penyaluran pupuk yang lebih maksimal sehingga tujuan kebijakan yaitu meringankan beban petani dan meningkatkan produksi pertanian di Desa Sumber Katon. Menurut Rohman (2020) untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan perlu adanya suatu kerjasama yang ahli di bidang tertentu atau perlu adanya penggerakan dari suatu pemimpin, karena orang tersebut yang menggerakkan atau mengkoordinasikan unsur-unsur di bawahnya supaya mencapai apa yang menjadi tujuan. Sehingga semakin tinggi tingkat komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak pada pelaksanaan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi maka pengkoordinasian semakin meningkat.

Hambatan-Hambatan yang Terjadi pada saat Komunikasi

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan yaitu salah satunya peneliti juga mendapatkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh pengecer dan distributor perlu ditingkatkan karena pelaporan yang dilakukan oleh pengecer biasa lambat melaporkan tentang keperluan pupuk akibatnya pengecer perlu menunggu waktu sampai distributor menyediakan pupuk tersebut. Hasil penelitian bahwa komunikasi terhambat dikarenakan pendekatan pemerintah dengan masyarakat yang kurang dan penyesuaian diri antara pemerintah dan masyarakat.

Disimpulkan bahwa komunikasi merupakan kunci sukses dari implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon karena komunikasi berkaitan dengan apa yang dilakukan antar sesama pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, tingkat komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat, dampak dari komunikasi terhadap proses implementasi kebijakan dan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat komunikasi. Disimpulkan bahwa komunikasi berkaitan dengan pemahaman antar pihak-pihak yang terlibat, saling memahami tujuan dan arah kebijakan yang dibuat. Usaha untuk memberikan pemahaman berupa perbaikan komunikasi dengan pemberian informasi dalam implementasi kebijakan publik.

Sumber Daya

Sumber daya (resources) di Desa Sumber Katon sangat dibutuhkan. Antaranya yaitu ketersediaan sumber daya yang mendukung, terkhusus sumber daya manusia dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu sumber daya material sangat diperlukan dalam menunjang pengimplementasian penyaluran pupuk bersubsidi. Sumber daya yang dimaksud yaitu terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk, pihak pelaksana di Desa Sumber Katon memiliki kemampuan yang baik dalam kebijakan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi, sumber daya manusia dan materil yang memadai. Berikut pembahasan dari hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti.

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi distributor yang ada di Desa Sumber Katon, Distributor merupakan untuk melakukan seperti pembelian, penyimpanan, selanjutnya penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi. Pihak lain yang ikut serta yaitu Pengecer tingkat kecamatan dan desa, dan Kelompok Tani serta Gabungan Kelompok Tani dan Petani. Diharapkan keterlibatan pihak-pihak tersebut mampu melaksanakan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan bekerja sesuai dengan koridornya. Menurut Handoyo (2012) bahwa dalam implementasi kebijakan juga terdapat aktor lain yang berpengaruh yaitu birokrat, kelompok sasaran, dan kelompok swasta. Sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi harus bersama-sama bukan saling bersaing agar tujuan kebijakan mampu tercapai.

Tempat Pelaksanaan dan Pihak Pelaksana Dalam Implementasi Pupuk Bersubsidi

Kemampuan yang baik mendukung implementasi penyaluran pupuk bersubsidi, pihak-pihak yang dilibatkan ditentukan sesuai dengan syarat-syarat yang dikeluarkan. Kemampuan dan tempat serta sarana prasarana yang baik mendukung implementasi penyaluran pupuk bersubsidi karena pihak-pihak mampu dan mengetahui fungsi dan tugas pokok yang telah diberikan, penguatan kelembagaan dan instrumen hukum menjadi pendukung kesuksesan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon. Setiap distributor memiliki tata cara atau sistem yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan permintaan sehingga penyaluran pupuk berdasarkan permintaan sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan kemampuan serta peningkatan sumber daya manusia dan materil dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi serta pelaksanaan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait karena pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan kunci peningkatan kinerja dalam implementasi dan efektivitas kebijakan. Implementasi dapat berhasil secara optimal harus memperhitungkan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan yang telah dibuat, sumber daya yang berintegritas dan berkompeten sangat diperlukan. Selain itu sumber anggaran atau materil yang mencukupi juga berperan penting dalam menunjang implementasi.

Disposisi

Disposisi adalah hal yang berkaitan dengan adanya kemauan, keinginan kuat para perlaku kebijakan dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah

dibuat secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan, berikut akan dibahas secara terperinci.

Pihak-Pihak Terkait Memiliki Keinginan yang Kuat untuk Melaksanakan

Kegiatan Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Sumber Katon memiliki keinginan yang kuat dalam menyukseskan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi. Keinginan ini diwujudkan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran. Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi merupakan bagian dari pelayanan publik, maka dari itu implementasi ini tidak bisa berdiri sendirinya tanpa disokong oleh keinginan yang kuat dari pihak-pihak yang terlibat untuk membawa peningkatan yang jauh lebih baik.

Keinginan yang kuat juga dirasakan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani bahwa keinginan yang kuat ini bisa dilihat dari peraturan yang dikeluarkan. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang begitu ketat dalam pengambilan pupuk yang hanya sudah terdaftar dalam Kelompok Tani dan RDKK. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari keinginan yang kuat dalam menyukseskan sebuah kebijakan yang telah disusun. Keinginan yang kuat tersebut dilaksanakan dalam bentuk peningkatan-peningkatan sumber daya manusia, materil maupun segi hukum dari implementasi kebijakan tersebut.

Tujuan Kebijakan Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pencapaian tujuan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi terus diusahakan meski terjadi banyak hambatan-hambatan. Pembatasan pupuk yang terjadi perlu ditindak lanjuti karena RDKK yang telah disusun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, maka dari itu tujuan implementasi belum terlaksana secara optimal. Dapat disimpulkan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon perlu memberikan dampak yang positif terhadap petani melalui RDKK yang harusnya mampu mencukupi kebutuhan petani akan pupuk, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Katon.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dari hasil wawancara didapatkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi harus berdasarkan hasil Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun petani. Komunikasi juga terjalin antara Distributor untuk menyalurkan pupuk yang selanjutnya nanti diberikan ke pengecer. Namun, di sisi lain pemberian informasi kepada petani belum optimal yang dirasakan langsung oleh petani di Desa Sumber Katon, hambatan-hambatan yang terjadi pada saat komunikasi yaitu salah satunya pembatasan kuota pupuk yang disalurkan.

Sumber Daya terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi yaitu, distributor yang ada di Desa Sumber Katon, Pengecer Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Petani. Pihak Pelaksana memiliki kemampuan dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi, penguatan kelembagaan dan instrumen hukum menjadi pendukung kesuksesan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon. Sumber daya manusia dan materil yang memadai dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Disposisi berkaitan dengan hasil penelitian menggunakan teknik wawancara terdiri dari pihak-pihak terkait memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan kegiatan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi. Pencapaian tujuan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi terus diusahakan meski terjadi banyak hambatan-hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu pemerintah harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan informasi mengenai pupuk bersubsidi agar para petani juga paham mengenai pengimplementasian pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon dan pemahaman tentang Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Selanjutnya, dibutuhkan tindak lanjut pemerintah tentang Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang mengalami pembatasan kuota pupuk bersubsidi ketika diajukan ke pusat. Terakhir, akan lebih baik lagi jika menggunakan kebijakan baru yang lebih modern seperti penggunaan Kartu Tani untuk mendukung implementasi penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada STISIPOL Dharmawacana Metro yang telah menyelenggarakan kegiatan penelitian ini, semua anggota kelompok penelitian dan distributor serta masyarakat penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang sudah ikut serta dan berpartisipasi dalam mensukseskan program Penelitian ini. Semoga semua diberikan kebaikan oleh Allah SWT.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITI

Penulisan artikel ini dilakukan oleh MW sebagai penulis pertama, WW sebagai penulis kedua memberikan ide untuk menyelesaikan penelitian ini sebagai pembimbing, selebihnya berperan sebagai pengumpul data dalam penelitian ini yaitu SS, TW, dan US.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Budi Winarno, (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.
- Dunn, W.N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah.
- Agustino, Leo. (2016). Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Nur Mufidah, Indah Prabawati. (2020). Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- Riant Nugroho, (2003). Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi,dan Evaluasi. Jakarta: PT Gramedia.
- Rohman, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa. Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 2(1), 30–36. <https://doi.org/2087-15111>
- Sugiyono, (2003). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, M.Si., (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: APII

Virginia SP, Sofia Pangemanan, Gustaf Undaf. Implementasi Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik (1st ed.; F. Hutari, Ed.).

Copyright Holder :

© Mirnawati, Wahyu Widodo, Sigit Setioko, Tri Widodo, Umi Salamah, (2024).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA